
Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Fungsi Dewan dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

**Ferdinant Nuru
David P. E. Saerang
Jenny Morasa**

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effect of the knowledge of budget, public participation and public policy transparency towards the local council function within budget control. The results shows that budgets knowledge, public participation and public policy transparency affect the council functions within local budget control. Only transparency of public policies that affect partially the council functions within regional budget control, while the budget knowledge and public participation did not affect the function of the local council within the budget control. The budget knowledge did not affect the council functions within budget control because it poorly supported by the competency level of councilors, while the public participation had no effect because the overall respondents answer can be concluded that public critique and suggestions is less accommodated especially public involvement in the budget advocacy.

Key words : *The knowledge of budget, public participation, public policy transparency, the local council functions, regional budget control.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Fungsi APBD pada awalnya sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, oleh karena itu fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopannah, 2005).

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan secara khusus dan masalah Pengelolaan APBD secara umum. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Sopannah, 2005). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian serta penjelasan di atas, maka sangat jelas bahwa fungsi legislatif atau DPRD dalam pengawasan APBD sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan APBD secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun kenyataan yang terjadi selama ini, bahwa masih banyak permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan APBD yang dilaksanakan lembaga eksekutif yang tidak dapat dikontrol dengan baik oleh lembaga legislatif karena masih rendahnya peranan legislatif atau DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Rendahnya peran legislatif ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah diuraikan di atas yaitu pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Dewan dalam pengawasan APBD.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memutuskan dalam penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Fungsi Dewan dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong?
3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong?

4. Apakah pengetahuan anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik secara simultan berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggaran terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik secara simultan terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pikiran dan memberikan manfaat yang berarti, yaitu :

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan kinerja DPRD dalam pengawasan APBD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*); sedangkan bagi partai politik dapat dijadikan acuan pada saat rekrutment anggota dewan dan pengembangan kader partai.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang sistem akuntansi sektor publik dan fungsi dewan dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengetahuan Anggaran

Mahsun (2012 : 145), menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan peraturan daerah tentang APBD.

2.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari tahap persiapan anggaran (*preparation*), ratifikasi (*approval/ratification*), implementasi (*implementation*), dan pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*) (Mardiasmo, 2009: 70).

2.3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparency merupakan salah satu Karakteristik *Good Governance* menurut *United Nation Development Program (UNDP)*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan

memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, (Mardiasmo, 2009: 20).

2.4. Fungsi DPRD sebagai Pengawas APBD

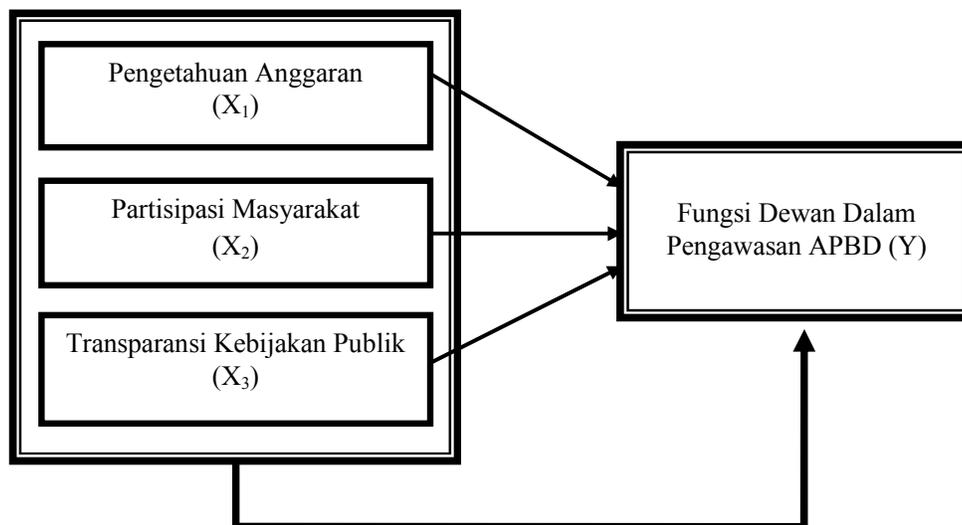
Pengawasan merupakan tahap yang integral dari keseluruhan tahapan dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2009). Pengawasan oleh dewan terhadap APBD dimulai pada saat proses penyusunan, pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban APBD.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Anggaran dan Pengawasan APBD telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Warimon (2005) yang meneliti mengenai “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat. (2) interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD, (3) interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD, (4) interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

3.2. Hipotesis

- H1 : Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.
- H2 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.
- H3 : Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

H4 : Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

4. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis/Rancangan Penelitian yang Digunakan

	(X ₁)	(X ₂)	(X ₃)	(Y)
Corrected Item-Total Correlation P1	.566	.622	.579	.597
Corrected Item-Total Correlation P2	.782	.490	.432	.658
Corrected Item-Total Correlation P3	.684	.490	.553	.492
Corrected Item-Total Correlation P4	.615	.604	.719	.522
Corrected Item-Total Correlation P5	.640	.475	.775	.724
Corrected Item-Total Correlation P6	.422	.735	.720	.476
Corrected Item-Total Correlation P7	.825	.689	.446	.725
Corrected Item-Total Correlation P8	.474	.733	.694	.365
Corrected Item-Total Correlation P9	.580	.663	.442	.492
Corrected Item-Total Correlation P10	.738	.475	.327	.339
Corrected Item-Total Correlation P11	.605	.725	.448	.381
Corrected Item-Total Correlation P12	.471	.541	.557	.614
Corrected Item-Total Correlation P13	.449	.663	.849	.415
Corrected Item-Total Correlation P14	.843	.539	.652	.302
Cronbach's Alpha	.759	.756	.754	.740

Jenis penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kausal yaitu untuk melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang dikuantitatifkan yaitu data mengenai pengetahuan tentang anggaran, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan dan pengalaman politik terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD yang dianggarkan (*scoring*) dengan menggunakan skala likert. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden yaitu seluruh anggota DPRD Kota Sorong periode 2009-2014.

4.2. Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian, (Masyhuri, Zainuddin M., 2009 : 151). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang berada di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong sebanyak 30 orang.

Sedangkan sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Metode pengambilan sampel adalah observasi, wawancara dan sensus atau kuesioner, yang mana seluruh populasi yaitu 30 orang anggota DPRD Kota Sorong dijadikan sebagai sampel.

4.3. Cara Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Menentukan profil responden.
2. Pengujian kualitas data
3. Pengujian Gejala Penyimpangan Asumsi Klasik.
4. Pengujian Hipotesis
5. Menentukan Koefisien Korelasi dan Determinasi
6. analisis regresi linier berganda

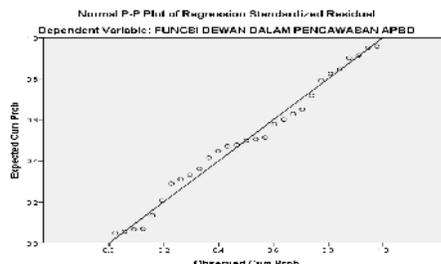
5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk pertanyaan 1-14 untuk variabel X_1 X_2 X_3 dan Y , mempunyai nilai korelasi di atas 0,30 dan *cronbach alpha* 0,743. Semua dinyatakan reliabel dan valid.

5.2. Uji Asumsi Klasik

4. Uji Normalitas

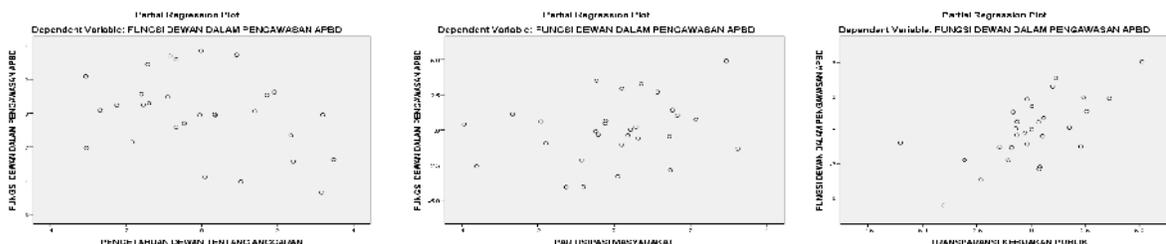


(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Gambar 5.1 Uji Normalitas

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa grafik *Normal P-P of regression standardized residual* memenuhi asumsi *normalitas* dimana penyebaran data di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut.

5. Uji Heteroskedastisitas



(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 5.2 dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y , hal ini membuktikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

6. Uji Multikoleniaritas

Tabel 5.2 Hasil uji multikoleniaritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.120	8.326
Partisipasi Masyarakat	.109	9.142
Transparansi Kebijakan Publik	.192	5.209

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Berdasarkan hasil *coefficients* yang terdapat pada tabel 5.2 dapat dilihat pada *output coefficients* model, dikatakan tidak terjadi gejala multikoleniaritas jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$.

5.3. Koefisien Korelasi (r)

Tabel 5.3 Koefisien Korelasi

		Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD
Pearson Correlation	Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD	1.000
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.693
	Partisipasi Masyarakat	.769
	Transparansi Kebijakan Publik	.857
Sig. (1-tailed)	Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD	.
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.000
	Partisipasi Masyarakat	.000
	Transparansi Kebijakan Publik	.000
N	Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD	29
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	29
	Partisipasi Masyarakat	29
	Transparansi Kebijakan Publik	29

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Hasil olahan data menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X_1) mempunyai korelasi yang bersifat kuat, positif dan signifikan dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y). Untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X_2) mempunyai korelasi yang bersifat kuat, positif dan signifikan dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y). Untuk variabel Transparansi Kebijakan Publik (X_3) mempunyai korelasi yang bersifat sangat kuat, positif dan signifikan dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y).

5.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Hasil uji koefisien korelasi dan determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.768	.740	2.248

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Dengan melihat tabel output SPSS *model Summary* maka dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) terlihat dari nilai *Adjusted R Square* karena penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel bebas yaitu sebesar 0,768 atau 76,8%, sedangkan 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.5. Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = 14,567 - 0,431X_1 + 0,361 X_2 + 0,831 X_3 + e$$

Tabel. 5.5 Koefisien Regresi

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	14.567	5.340
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	-.431	.225
	Partisipasi Masyarakat	.361	.249
	Transparansi Kebijakan Publik	.831	.192
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran		

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Konstanta α sebesar 14,567 memberikan pengertian bahwa jika pengetahuan anggaran (X_1), Partisipasi masyarakat (X_2), dan transparansi kebijakan publik (X_3) sama dengan nol (0), maka efektivitas fungsi dewan dalam pengawasan APBD di DPRD Kota Sorong adalah 14,567 satuan skor.

Variabel pengetahuan anggaran (X_1), memiliki nilai koefisien regresi (β) sebesar -0,431, ini berarti bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel pengetahuan anggaran (X_1) maka fungsi dewan dalam pengawasan APBD akan berkurang

sebesar 0,431 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel pengetahuan anggaran (X_1) bernilai negatif, artinya terdapat hubungan negatif antara (X_1) pengetahuan anggaran dengan (Y) fungsi dewan dalam pengawasan APBD. Artinya bahwa semakin berkurang nilai pengetahuan dewan tentang anggaran, maka akan berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap APBD di DPRD Kota Sorong.

Variabel Partisipasi masyarakat (X_2), memiliki nilai koefisien regresi (β) sebesar 0,361, ini berarti bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel Partisipasi masyarakat (X_2), akan meningkatkan nilai fungsi dewan dalam pengawasan APBD sebesar 0,361 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel Partisipasi masyarakat (X_2), bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara (X_2) Partisipasi masyarakat dengan (Y) fungsi dewan dalam pengawasan APBD. Artinya bahwa jika Partisipasi masyarakat (X_2) semakin meningkat maka akan meningkatkan fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y) di DPRD Kota Sorong.

Variabel transparansi kebijakan publik (X_3), memiliki nilai koefisien regresi (β) sebesar 0,831, ini berarti bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel transparansi kebijakan publik (X_3), akan meningkatkan nilai fungsi dewan dalam pengawasan APBD sebesar 0,831 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel transparansi kebijakan publik (X_3), bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara (X_3) transparansi kebijakan publik dengan (Y) fungsi dewan dalam pengawasan APBD. Artinya bahwa semakin meningkat nilai transparansi kebijakan publik (X_3), maka akan meningkatkan fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y) di DPRD Kota Sorong.

5.6. Pengujian Hipotesis (Uji F)

Tabel 5.6 Analysis Of Variance

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	418.935	3	139.645	27.625	.000 ^a
Residual	126.376	25	5.055		
Total	545.310	28			

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Dari tabel 5.25 diketahui nilai $F_{hitung} = 27,625$. Angka tersebut lebih besar dari $F_{tabel} = 2,991$ ($F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $27,625 > 2,991$) pada tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa, Pengetahuan Anggaran (X_1), Partisipasi Masyarakat (X_2) dan Transparansi Kebijakan Publik (X_3), secara bersama-sama berpengaruh terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD (Y).

5.7. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tabel 5.7 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	14.567	5.340		2.728
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	-.431	.225	-.533	-1.920
Partisipasi Masyarakat	.361	.249	.423	1.451
Transparansi Kebijakan Publik	.831	.192	.949	4.319

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Dari tabel 5.26 dapat diketahui hasil uji t untuk masing-masing variabel secara parsial yaitu, nilai koefisien regresi X_1 memiliki tingkat signifikansi 0,066, nilai ini lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > \alpha$ atau $0,066 > 0,05$); apabila menggunakan nilai t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar -1,920 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2,060 ($t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-1,920 < 2,060$). Hal ini berarti bahwa Variabel Pengetahuan Anggaran (X_1) tidak berpengaruh terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD di DPRD Kota Sorong.

Nilai koefisien regresi X_2 memiliki tingkat signifikansi 0,159, nilai ini lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > \alpha$ atau $0,159 > 0,05$); apabila menggunakan nilai t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,451 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2,060 ($t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $1,451 < 2,060$). Hal ini berarti bahwa Variabel Partisipasi Masyarakat (X_2) tidak berpengaruh terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD di DPRD Kota Sorong.

Nilai koefisien regresi X3 memiliki tingkat signifikansi 0,014, nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < \alpha$ atau $0,014 < 0,05$); apabila menggunakan nilai t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,658 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,060 ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $2,658 > 2,060$). Hal ini berarti bahwa Variabel Transparansi Kebijakan Publik (X_3) berpengaruh terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD di DPRD Kota Sorong.

5.8. Pembahasan

1. Pengetahuan anggaran tidak berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

Pengetahuan anggaran tidak berpengaruh terhadap fungsi dewan dalam pengawasan APBD terjadi karena kurang didukung oleh pemahaman anggota dewan mengenai penganggaran.

2. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

Keterlibatan masyarakat yang setiap tahunnya dilakukan melalui musrenbang untuk menjaring aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik. Problem nyata yang dihadapi adalah ternyata mekanisme partisipasi yang ada tidak cukup memberikan ruang apresiatif dari masyarakat karena partisipasi yang dijalankan hanyalah partisipasi yang semu, simbolis penuh dengan manipulasi karena aturan-aturan itu tidak bisa menjamin proses penganggaran, berdasarkan *people need assessment*.

3. Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

4. Pengetahuan anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Isma Coryanata. (2007), Wardayani (2010), Sari (2010) menyimpulkan bahwa secara simultan pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Werimon (2005) dan Winarna & Murni (2007) menyatakan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

6. PENUTUP

6.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

3. Pengetahuan Anggaran (X_1), tidak berpengaruh terhadap fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y) adalah sebesar koefisien regresi (β) -0,431, dengan nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $-1,920 < 2,060$. Artinya bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel pengetahuan anggaran maka fungsi dewan dalam pengawasan APBD akan berkurang sebesar 0,431 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel pengetahuan anggaran bernilai negatif, artinya terdapat hubungan negatif antara pengetahuan anggaran dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD.
4. Partisipasi Masyarakat (X_2), tidak berpengaruh terhadap fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y) adalah sebesar koefisien regresi (β) 0,361 dengan nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($1,451 < 2,060$). Artinya bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel Partisipasi masyarakat, akan meningkatkan nilai fungsi dewan dalam pengawasan APBD sebesar 0,361 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel Partisipasi masyarakat bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara Partisipasi masyarakat dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD.
5. Transparansi Kebijakan Publik (X_3), berpengaruh terhadap fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y) adalah sebesar koefisien regresi (β) 0,831, dengan nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $2,658 > 2,060$. Artinya bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel transparansi kebijakan publik, akan meningkatkan nilai fungsi dewan dalam pengawasan APBD sebesar 0,831 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel

transparansi kebijakan publik, bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara transparansi kebijakan publik dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD.

6. Secara bersama-sama Pengetahuan Anggaran (X_1), Partisipasi Masyarakat (X_2), dan Transparansi Kebijakan Publik (X_3) berpengaruh terhadap fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y) dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $27,625 > 2,991$, pada tingkat signifikansi 0,05.
7. Kontribusi dari pengetahuan anggaran (X_1), partisipasi masyarakat (X_2), dan transparansi kebijakan publik (X_3) terhadap variasi naik turunnya fungsi dewan dalam pengawasan APBD di Kota Sorong adalah sebesar koefisien determinasi $R^2 = 0.740$ atau 74%. sedangkan sisanya sebanyak 26 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan agar supaya sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan fungsi DPRD di bidang pengawasan sangat diperlukan pengetahuan dan kemampuan tentang anggaran, maka disarankan agar seluruh anggota DPRD diberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan DPRD dalam pengawasan APBD, dan secara khusus bagi anggota DPRD yang berhubungan dengan pengawasan dan anggaran.
2. Untuk memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat kebijakan, sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan *input*. Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli di bidangnya. Dengan menggunakan hasil kajian ini diharapkan DPRD tidak salah dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif B, Muchis, Iskandar, (2009) *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Akademia, Jakarta
- BAPEDA Kota Sorong, 2010, Profil Kota Sorong
- Coryanata I. 2007, *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar
- Mardiasmo, (2009); *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi IV, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mahsun, Moh. (2012) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama*, Penerbit BPFY Yogyakarta., Cetakan Ketiga Januari 2012.
- Masyhuri, Zainuddin, M., *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Cetakan kedua, Penerbit PT. Refika Aditama Bandung, 2009.
- Nafarin, M., (2004) *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
- Nordiawan D. *et. al*, 2012, Putra I.S dan Rahmawati M. *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat
- Nordiawan D. dan Hertianti A., 2012, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat
- Riduwan, H. Sunarto, (2009), *Pengantar Statistika*, Penerbit ALFABETA Bandung
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Sari I. 2010, *Pengaruh Personal Background dan Political Background Serta Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah/APBD*
- Sopannah, 2005, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)* Jurnal Logos, Vol 3 No. 1 Juli 2005.
- Sarjono, Haryadi & Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta : Salemba Empat.

- Wahjono, S.I., 2006, *Perilaku Organisasi*, penerbit Graha Ilmu
- Wardayani, 2010, *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderasi*.
- Weney M., 2012, *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur SKPD*
- Werimon S, 2005, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*
- Werimon S, *et al.*, 2007, Ghozali dan Nazir Moh., *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar.
- Winarna J dan S. Murni. 2007, *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar.
- Wibowo. A.E., 2012, *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*, Penerbit Gaya Media Yogyakarta.
- Cendrawasi Pos, (Keerom, Papua) Kamis, 01 Maret 2012 , 18:12:00
- Suara Karya** (Sorong-Papua Barat), 12 September 2006